

## **BAB VI**

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008 secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas pembangunan yang terfokus dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Prioritas Pembangunan daerah kemudian dijabarkan kedalam (1) Prioritas Pimpinan Daerah (*Dedicated Program*), (2) Prioritas Wilayah dan (3) Prioritas APBD 2008.

#### **A. Prioritas Pimpinan Daerah (*Program Dedicated*)**

Program Prioritas Daerah yang bersifat top down dikenal dengan sebutan Program *Dedicated* yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sector, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Melihat urgensinya, dapat bersifat *multi-years* yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Di bidang fisik, terdapat pembangunan flyover, underpass, banjir kanal timur, transportasi massal dan sejenisnya. Di bidang sosial, terdapat perbaikan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya. Mekanisme pengalokasian anggaran untuk Program *Dedicated* menggunakan pendekatan *top-down*, sehingga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program tersebut.

Prioritas pembangunan tahun 2008 diarahkan untuk menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. **Terselesainya tahapan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir untuk mengurangi banjir dan genangan di 26** kawasan rawan banjir, antara lain : Banjir Kanal Timur; Kali Ciliwung; Kali Krukut.
2. **Meningkatnya kapasitas pelayanan angkutan umum**, antara lain: terbentuknya kelembagaan Mass Rapid Transit (MRT); Beroperasinya Busway koridor 11 dan 12, meningkatnya kualitas pelayanan Busway koridor 1 sampai 10, restrukturisasi trayek angkutan umum dan pengembangan sistem feeder, serta peningkatan kapasitas ruas jalan dan persimpangan.
3. **Berkurangnya jumlah penduduk miskin**, antara lain: meningkatnya akses Gakin terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, beras murah, permodalan usaha (PPMK), layanan rumah susun sewa serta tertatanya lingkungan permukiman kumuh
4. **Berkurangnya polusi udara**, antara lain: Menurunnya tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi dari sumber bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri) yang melebihi baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan; Menurunnya tingkat pencemaran udara dalam ruangan; dan Menurunnya jumlah pelanggaran pada kawasan Dilarang Merokok.
5. **Berkurangnya pencemaran air**, antara lain : Mneingkatnya status mutu air (sungai, waduk/situ, air tanah, muara, perairan Teluk Jakarta) yang memenuhi baku mutu; Berkurangnya rumah tangga dan non rumah tangga yang membuang limbah domestiknya melebihi baku mutu serta industri yang membuang limbah cairnya melebihi baku mutu.
6. **Meningkatnya kapasitas penanggulangan sampah**, antara lain: meningkatnya kemandirian pengelolaan sampah di sumber, meningkatnya layanan TPS/LPS dan terlaksananya tahapan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Duri Kosambi.

7. **Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan**, antara lain: Tidak terjadinya putus sekolah bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK, terlaksananya wajib sekolah bagi PMKS (anjak, gepeng, UKS, TBM, dan lain-lain) usia sekolah dan berkurangnya anak usia sekolah yang tidak bersekolah
8. **Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular**, antara lain: penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberculosis (TBC), Flu Burung dan HIV/AIDS.
9. **Menurunnya jumlah penyalahgunaan Narkoba**, antara lain : peningkatan koordinasi pengawasan produksi dan peredaran narkotika dengan pihak berwajib, peningkatan pengawasan dan pembinaan serta KIE penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
10. **Meningkatnya peran Jakarta sebagai kota budaya**, antara lain: beroperasinya kawasan Kota Tua, Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Perpustakaan Besar DKI Jakarta dan berfungsinya perkampungan budaya betawi sebagai sentra budaya betawi.
11. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik di garis depan**, antara lain: pelayanan kelurahan, pelayanan kecamatan dan pelayanan di UPT-SKPD lainnya.
12. **Meningkatnya kapasitas pengelolaan bencana**, antara lain: meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, terintegrasinya upaya masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana, serta berfungsinya Badan Pengelola Bencana Provinsi DKI Jakarta dan Crisis Center.
13. **Terlaksananya tahapan pembangunan terminal agribisnis dengan komoditi unggulan antara lain sayur mayur, buah-buahan, unggas, ikan dan daging.**
14. **Berfungsinya satuan kerja perijinan investasi Provinsi DKI Jakarta melalui satu pintu**

15. **Berfungsinya kelembagaan Sentra Primer Baru Timur untuk pengembangan Jakarta ke wilayah timur dan Sentra Primer Baru Barat untuk pengembangan Jakarta ke wilayah barat.**
16. **Berfungsinya kelembagaan pelabuhan perikanan untuk wilayah timur, wilayah tengah dan wilayah barat Jakarta**
17. **Terintegrasinya sistem informasi untuk perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan APBD dan pengawasan internal.**
18. **Dilaksanakannya pelelangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)**
19. **Meningkatnya pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan korban trauma**
20. **Terintegrasinya upaya pembinaan kepemudaan** antara lain, karang taruna, pramuka, Palang Merah Remaja, siswa SMP/SMA, mahasiswa, dokter kecil pemuda pelopor/SP3, Wirausaha, Kelompok Ilmiah Remaja, dan pertukaran pemuda antar Negara yang dilaksanakan oleh berbagai sector dan masyarakat.
21. **Terintegrasinya upaya peningkatan kebugaran masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan masyarakat.**
22. **Terintegrasinya upaya perlindungan/pemberdayaan anak** antara lain; anak jalanan, anak korban kekerasan, anak korban trafficking, pekerja anak, dan anak nakal yang dilaksanakan oleh berbagai sector dan masyarakat.
23. **Terintegrasinya upaya masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan masalah Pengemis, gepeng, PSK, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Eks Napi, Eks PSK, orang terlantar, waria dan preman**
24. **Terintegrasinya upaya masyarakat dan pemerintah dalam membangun masyarakat multi etnik, multi agama dan multi ras untuk mencegah kerusuhan social di tingkat akar rumput.**

25. **Ditingkatkannya kualitas dan kapasitas sektor informal** antara lain bengkel, kaki lima, tukang kayu, tukang batu, dan pekerja rumah tangga
26. **Ditingkatkannya frekuensi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta**
27. **Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, antara lain Dipertahankannya kualitas RTH Publik sebagai sarana sosial, sarana lingkungan, dan identitas kota, bertambahnya taman kota dan taman pemakaman umum, bertambahnya jumlah dan kualitas RTH pada RW Kumuh di lima wilayah kotamadya, terlaksananya rehabilitasi dan perawatan hutan mangrove di pantai Marunda dan Cilincing. meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Privat, dan peningkatan Kali Ciliwung Segmen MT Haryono s/d Pintu Air Manggarai agar memiliki dimensi sesuai rencana teknis serta bantaran yang bersih, hijau dan terang.
28. **Berkembangnya Kawasan Pemukiman Marunda**, antara lain: terbangunnya Rumah Susun Sewa yang dihuni oleh penghuni dengan kemampuan ekonomi lemah (eks bantaran kali dan kolong jalan tol), berfungsinya Angkutan umum Marunda – Tanjung Priok, terkoordinasi penyediaan air minum, terkoordinasinya penyediaan listrik dan terkoordinasinya penyediaan Pasar Basah.

## **B. Prioritas Wilayah**

Program prioritas wilayah merupakan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian di ke enam wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki program prioritas yang beragam.

Program prioritas wilayah tersebut antara lain:

1. Wilayah Jakarta Barat meliputi revitalisasi kawasan kota tua, pengembangan hutan kota Srengseng sebagai kawasan konservasi, dan pengembangan kawasan sentra primer baru barat.

2. Wilayah Jakarta Utara meliputi pengembangan pantai publik Marunda.
3. Wilayah Jakarta Pusat meliputi Penataan Kawasan Senen dan Pasar Baru sebagai kawasan wisata belanja dan Rekreasi serta Program kota sehat di 35 RW kawasan kumuh.
4. Wilayah Jakarta Selatan meliputi Penataan Kawasan Situ Babakan sebagai daerah resapan air, dan wisata.
5. Wilayah Jakarta Timur meliputi penataan kawasan Segitiga Jatinegara dan Program Kota sehat di 3 Kelurahan.
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meliputi Pembangunan kabel bawah laut, Sea Farming, pengembangan incenerator di kawasan pemukiman serta penyediaan transportasi dari dan ke Kepulauan Seribu.

### **C. Prioritas APBD 2008**

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, maka kebijakan prioritas pengalokasian APBD 2008 diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya ketiga prioritas pembangunan diatas. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci Prioritas APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata, dan untuk kepentingan masyarakat luas (program dedicated).
2. Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.

3. Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
4. Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
5. Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.